

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sinar Harapan, Jakarta, 1994).
- Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000).
- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum*, (Bandung: Mandar Maju.,2008).
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, ed. Leny Wulandari, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Pustaka Refleksi. Makasar. 2010).
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007).
- Muhammad Akbar and M Hum. "*Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi 1998*". (Jawa Tengah: Eureka Media Akasara, 2018).
- Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ed. Suwito, Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013).
- Romi Librayanto, *Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Makasar: PUKAP: 2008).
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Rajawali Pers, Jakarta,2013).
- Soejono, Abdurrahman, *Metode penelitian hukum*,(Jakarta rineka cipta 2003).

Jurnal

- Efendi, B. “Negara Dan Masyarakat Sipil: Hubungan Pemerintah Daerah Riau Dengan LAM Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas ilmu politik dan Ilmu soisal*. Vol. 1, No. 1, 2015.
- Khairi M, “Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah persepektif Teori Negara Hukum,” *Jurnal Selisik*, Vol. 3, No. 5, 2020: 79102.
- Manik, Herlina. “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat”. *Jurnal Selat*. Vol. 6, No. 2, 2019 :213-24.
- Maryati Bachtiar. Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian KonflikTanah Ulayat di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 2. 2018: 298 – 312.
- Mizaj Iskandar, Emk Alidar. “*Otoritas Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Aceh*”. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh 2020). hal. 121-122.
- Nopriyandri., Usman. S. “Penerapan Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi Dalam Mewujudkan Good Governance Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi”. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol. 2, No. 2, 2018: 113-126.
- Nur Utaminingsih, Muh. Zikir, Muhammd Saleh Tajuddin Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat. *VOX POPULI*. Vol. 3, No. 2, 2020: 75-90.
- Ramli, Supian, Putri, S.M, Fatonah. “Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi”. *Jurnal Titian*. Vol. 1, No. 2, 2017: 191 - 203.
- Regar, N. A., Pasaribu, S. O., Gaol, D. L., & Ivanna, J. Peran Lembaga Adat dalam Sistem Pemerintahan di Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 2, 2024: 24139–24145.
- Salsabila, L. A., Tambun, D. P. B., & Batubara, A. P. S. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Perspektif Hukum. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 8, No. 2, 2024: 24139-24145.
- Triningsih A dan Mardiya N.Q, “Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 14, No. 4, 2018: 778.
- Yusuf F, Jamal M, Budiman. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019 *eJournal Ilmu Pemerintahan* , Vol. 6, No. 3, 2018: 1193.

Zainuddin, M. Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*. Vol. 6, No. 1, 2018: 1-125.

Peraturan undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Kota Jambi. Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 4.

SKRIPSI

Nofran Wahyuda Putera, *Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintah Otonom Di Nnagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok*. S1 Skripsi. Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU (2020).

INTERNET

Damang, “Pengertian Kewenangan”, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>. Diakses 21 Maret 2025.

Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”, <http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>. Diakses 20 Maret 2025.

Sony Pungus “Teori Kewenangan”, http://sonny_tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html. Diakses 21 Maret 2025.